

## Kinerja *Error*, Personil Politap Diganti

KETAPANG. Banyaknya persoalan di lingkungan manajemen Yayasan Politeknik Ketapang (Politap) harus segera dibenahi. Waktu dekat ini, Bupati, Drs Henrikus, M.Si akan menggelar rapat untuk membenahi personil serta manajemen Politap.

"Kami menilai yayasan ini *error*. Karena kiprah yayasan tidak terlalu dominan. Harusnya yang lebih dominan adalah yayasan. Kita minta rapat segera, karena sudah habis masanya. Segera kita bentuk personil yayasan, karena yayasan itulah yang mengangkat direktur," kata Bupati ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Dijelaskannya, yayasan lah yang seharusnya proaktif. Direktur tidak mesti mencampuri soal urusan gaji maupun keuangan. Semua menjadi tanggungjawab yayasan. Direktur maupun dosen konsen pada sisi pendidikan mahasiswa.

"Kepala sekolah, direktur tidak mencampuri urusan gaji. Mereka terima gaji, tapi bagaimana dia manage pendidikan itu dengan kualitas. Sebetulnya direktur itu tidak mau tahu kekurangan itu, harusnya yayasan," jelasnya.

Magister ilmu pemerintahan alumnus UGM itu mengungkapkan, yayasan pengelola pendidikan banyak yang profit (untung). Hal ini berbanding terbalik dengan Politap yang setiap tahunnya harus menerima kucuran dana dari Pemkab.

Ditegaskannya hibah dari pemerintah tidak boleh terus menerus. Lama-lama bakal menjadi temuan BPK. Karena itu ia menuntut kemandirian yayasan.

"Yayasan manapun yang bergerak di bidang pendidikan banyak yang profit, seperti Muhammadiyah dan Pangudi luhur. Ini (Politap) malah subsidi pemerintah daerah besar," ungkapnya.

Karena itu, mau tidak mau pergantian personil di yayasan akan segera dilakukan. Henrikus mengaku tak akan mengubah yayasannya melainkan personilnya.

"Kita akan membenahi yayasannya dulu. Yayasan bisa sama namanya isinya beda. Kita tidak merobah lagi struktur. Kita akan tempatkan orang yang berjiwa pendidikan," ujarnya.

Ia mengaku sebenarnya mengharapkan Politap itu menjadi Poltek Ketapang tanpa adanya yayasan, statusnya negeri. Selain tak diperbolehkan lantaran harus melalui yayasan lebih dulu, prosesnya juga panjang.

Terkait masalah solusi bagi penundaan gaji yang menjadi polemik, Bupati meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Soalnya, hal ini sudah menjadi opini di masyarakat. Soal sisa pembayaran 50 persen, kata dia, itu tetap menjadi hak dosen maupun karyawan. Namun ia juga tak mau terburu-buru mengambil sikap.

"Kalau kita terburu-buru mengambil tindakan sebelum pemeriksaan, takutnya sudah salah, salah lagi. Maklumlah ini menyangkut kebijakan keuangan. Kita tuntaskan dulu itu. Dengan melalui prosedural, pasti kita atasi," janjinya. (KIA)